

**EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KREDIT MACET
PADA PD BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BKK PURWOREJO
PERIODE TAHUN 2012-2013**

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi sebagai Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Profesi Ahli Madya Akuntansi



Oleh:
RESTU WIJI NOVIRA
11409134067

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

**EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KREDIT MACET
PADA PD BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BKK PURWOREJO
PERIODE TAHUN 2012-2013**

TUGAS AKHIR


Telah disetujui dan disahkan Pembimbing Tugas Akhir

Program Studi Akuntansi Diploma III

Pada tanggal..... 5 Mei 2014

Disetujui

Ketua Program Studi
Akuntansi D III



Amanita Novi Yushita, M.Si.
NIP. 19770810 200604 2 002

Dosen Pembimbing



Ngadirin Setiawan, M.S.
NIP.19561014 198111 1 001

Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Wates

Ketua Pengelola,



Sanjaya Saptono, M.Si.
NIP. 19610723 198803 1 001

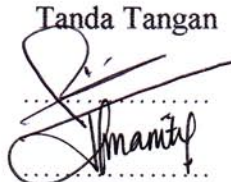
TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KREDIT MACET PADA PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BKK PURWOREJO PERIODE TAHUN 2012-2013

Disusun Oleh :
Restu Wiji Novira
11409134067

telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi D III
Fakultas Ekonomi - Universitas Negeri Yogyakarta
Pada Tanggal 3 Juni 2014 dan dinyatakan telah memenuhi
Syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Susunan Tim Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua merangkap anggota	Ngadirin Setiawan, M.S.	
Sekretaris merangkap anggota	Amanita Novi Yushita, M.Si.	

Yogyakarta, 9 Juni 2014

Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Wates



Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP. 19550328 198303 1 002



Bambang Saptono, M.Si.
NIP. 19610723 198803 1 001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Restu Wiji Novira
NIM : 11409134067
Program Studi : Akuntansi DIII
Fakultas : Ekonomi
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Pengendalian Kredit Macet Pada PD Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo Periode
Tahun 2012-2013

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil kerja sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang di publikasikan atau dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di Perguruan Tinggi oleh orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta,2014

Yang Menyatakan

Restu Wiji Novira

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Jika telah menasehatiku dan menegurku agar menghargai waktu dengan mengatakan, ada hari kemarin, ada pula hari esok, pada saat itu aku menganggap masa lalu sebagai epos yang hilang dan harus dilupakan, dan masa depan, kuanggap sebagai saat yang tak perlu kuraih “tapi sekarang aku telah belajar ini : bahwa kedatangan waktu yang singkat, dengan segala yang ada dalam waktu, dapat diraih dan menjadi kenyataan”

(Kahlil Gilbran)

PERSEMBAHAN

Seiring ungkapan rasa syukur, dengan segala kerendahan hati Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

- Orang Tuaku tersayang yang tiada surut memberi kasih sayang dengan tulus, mengiringi setiap langkahku dengan doa, dan telah membimbing serta mengarahkanku dalam menjalani hidup

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KREDIT MACET PADA PD BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BKK PURWOREJO PERIODE TAHUN 2012-2013

Oleh :
RESTU WIJI NOVIRA
11409134067

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) faktor-faktor penyebab kredit macet pada PD BPR BKK Purworejo, (2) teknik-teknik pengendalian yang digunakan pada PD BPR BKK Purworejo dalam mengatasi masalah kredit macet, (3) efektivitas pengendalian kredit macet yang dilakukan PD BPR BKK Purworejo.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dipergunakan adalah Laporan Kualitas Aktiva Produktif PD BPR BKK Purworejo tahun 2012-2013. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu pemilihan data dan pengambilan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada PD BPR BKK Purworejo terdiri dari faktor eksternal, seperti kegagalan usaha, adanya debitur PNS yang dinonaktifkan dan musibah (misalnya : kebakaran dan bencana alam) sedangkan faktor internal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari pihak bank itu sendiri, misalnya kesalahan petugas bank dalam menganalisa calon debitur, kurang jeli nya petugas bank dalam melakukan survey jaminan kredit, kurangnya pengawasan/*monitoring* kredit dan adanya hubungan keluarga antar karyawan bank dengan calon debitur (2) teknik-teknik pengendalian yang digunakan pada PD BPR BKK Purworejo dalam mengatasi masalah kredit macet terdiri dari teknik pengendalian *preentif*, misalnya : penyeleksian debitur dan penilaian kredit sedangkan teknik pengendalian *represif* misalnya dengan cara melalui pemberian surat tagihan 1,2, dan 3, negosiasi antara pihak bank dengan debitur, penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi yang tercatat secara yuridis berhak menagih piutang dan penagihan kredit macet pada balai harta peninggalan (BHP). (3) Hasil dari teknik-teknik pengendalian yang digunakan PD BPR BKK Purworejo mampu menurunkan presentase kredit macet yaitu pada tahun 2012 Semester I 10,90% sedangkan Semester II sebesar 9,03%, Tahun 2013 Semester I sebesar 8,85% sedangkan Semester II sebesar 8,62%.

Kata Kunci : Pengendalian, Kredit Macet.

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir dengan judul Efektivitas Pengendalian Kredit macet Pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo dapat terselesaikan. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi Diploma III Universitas Negeri Yogyakarta.

Terselesainya Tugas Akhir ini berkat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, Ma., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Dr.Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
3. Bambang Saptono, M.Si., selaku Ketua Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates yang telah memberikan ijin untk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan penyusunan laporan ini.
4. Ibu Amanita Novi Yushita, M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi D III yang telah memberikan bimbingan kepada praktikan.
5. Bapak Ngadirin Setiawan, M.S., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan praktikan.

6. Direktur PD BPR BKK Purworejo beserta staff yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun Tugas Akhir ini.
7. Seluruh Dosen yang telah memberikan bekal teori selama proses di bangku kuliah.
8. Teman-teman jurusan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu terima kasih untuk bantuannya.
9. Segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta,2014

Penyusun

Restu Wiji Novira

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II. KAJIAN TEORI.....	8
A. Deskripsi Teori.....	8
1.Kredit.....	8
a.Pengertian kredit.....	8
b.Unsur-unsur Kredit.....	9
c.Tujuan Kredit.....	11
d.Fungsi Kredit.....	12
e.Jenis-jenis Kredit.....	15
f. Prinsip-prinsip Kredit.....	16
g.Pertimbangan Kredit.....	21
h.Kebijaksanaan Perkreditan.....	24
i. Penggolongan Kolektabilitas Kredit.....	26
2.Faktor-faktor Penyebab Kredit.....	29
a.Sisi Nasabah.....	30
b.Sisi Ekstern.....	32
c.Sisi Bank.....	33
3.Pengendalian Kredit Macet.....	33
a.Pengertian Pengendalian Kredit Macet.....	33
b.Tujuan Pengendalian Kredit Macet	34
c.Sistem Pengendalian Kredit Macet.....	35
d.Teknik-teknik Pengendalian Kredit Macet.....	35

B. Kerangka Berpikir.....	38
C. Pertanyaan Penelitian.....	39
BAB III. METODE PENELITIAN.....	40
A. Desain Penelitian.....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
C. Obyek dan Subyek Penelitian.....	40
D. Jenis Data yang Dikumpulkan.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1.Data Umum.....	43
a.Sejarah Berdirinya PD. BPR BKK PURWOREJO.....	43
b.Visi Misi dan Strategi Perusahaan PD. BPR BKK PURWOREJO.....	45
c.Maksud dan Tujuan PD. BPR BKK PURWOREJO.....	45
d.Struktur Organisasi PD. BPR BKK PURWOREJO.....	47
e.Tugas dan Fungsi PD. BPR BKK PURWOREJO.....	48
f. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PD. BPR BKK PURWOREJO.....	57
g.Produk-produk PD. BPR BKK PURWOREJO.....	68

2.Data Khusus.....	76
B. Pembahasan	77
1.Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet PD. BPR BKK PURWOREJO.....	77
2.Teknik-teknik Pengendalian Kredit Macet PD. BPR BKK PURWOREJO.....	79
3.Hasil Pengendalian Kredit yang Dilakukan PD. BPR BKK PURWOREJO Guna Mengatasi Kredit Macet dengan Menggunakan Teknik Pengendalian <i>Preventif</i> dan Teknik Pengendalian <i>Represif</i>	87
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

TABEL

1. Saldo Minimum dan Suku Bunga Tabungan masyarakat.....	72
2. Saldo Minimum dan Suku Bunga Tabungan pelajar.....	73
3. Jenis dan Suku bunga Deposito.....	75
4. Ringkasan Laporan Kualitas Aktiva Produktif.....	76
5. Presentase Kolektabilitas Kredit Macet.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Struktur Organisasi PD. BPR BKK PURWOREJO.....	47
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akibat resesi ekonomi dunia pembangunan ekonomi Indonesia kembali terpuruk, banyak perusahaan kekurangan modal usaha karena mengalami kerugian yang terus menerus. Bank sebagai pilar pembangunan nasional memegang peranan penting dalam perekonomian, karena bank merupakan salah satu sumber permodalan bagi berbagai usaha. Dalam berbagai buku perbankan, suatu bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat, memberikan kredit baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun dana yang diterima dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah maupun Bank Indonesia. Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif yaitu kredit. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Kredit adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit macet merupakan kondisi dimana pihak bank merasa sangat dirugikan karena akan mengurangi tingkat likuiditas bank tersebut dan apabila kondisi bank tersebut sudah terlalu parah yakni pasiva lebih besar dari pada aktiva maka penutupan atau likuidasi tidak dapat dihindarkan lagi. Saat sekarang ini kredit macet tengah banyak dialami dunia perbankan karena terjadinya krisis global yang tengah melanda dunia termasuk Indonesia. Salah satu faktor penyebab terjadinya kredit macet adalah debitur mengalami kebangkrutan dalam usahanya, sehingga debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang digunakan sebagai modal usahanya. Selain itu, kredit macet juga dapat terjadi karena kurangnya usaha-usaha yang dilakukan bank untuk meningkatkan pembinaan terhadap masalah kredit macet.

Pengalaman adanya kredit macet akhir-akhir ini telah memacu kalangan perbankan untuk lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana kredit. Disamping peningkatan sistem pembinaan nasabah, rencana kredit disusun lebih matang, analisis atas permohonan kredit lebih terarah dan

pengamanan kredit juga lebih digalakkan. Semua ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Berkaitan dengan kredit macet di atas PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo ini sudah jelas bahwa usaha yang dilakukannya bergerak dalam bidang perkreditan. Pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo masih banyak terjadi kredit macet. Selain itu, usaha yang dilakukan bank untuk menghimpun dana masih belum maksimal. Sehingga perlu ada usaha lain yang dilakukan untuk menghimpun dana guna melakukan semua kegiatan di Bank, baik berupa tabungan maupun deposito. Bank tidak dapat terhindarkan dari masalah kredit macet, terutama jika bank kurang efektif dalam menjalankan teknik-teknik pengendalian dalam mengatasi kredit macet. Dalam usaha perkreditan ini, pihak bank berusaha meminimumkan risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila sampai terjadi kredit macet maka bank harus melakukan teknik-teknik pengendalian yang lebih efektif sampai dengan tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan lelang atas barang agunan yang diserahkan oleh debitur.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo dengan memilih judul **“Efektivitas Pengendalian Kredit Macet**

pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo Periode Tahun 2012-2013”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Banyak terjadi masalah kredit macet pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo.
2. Kurangnya usaha untuk meningkatkan pembinaan terhadap masalah kredit macet pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo.
3. Usaha yang dilakukan PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo untuk menghimpun dana guna melakukan semua kegiatan di bank belum maksimal.
4. Teknik-teknik pengendalian yang digunakan dalam mengatasi kredit macet pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo belum berjalan efektif.

C. Pembatasan Masalah

Menjaga agar pembahasan permasalahan yang di bahas tidak terlalu meluas atau keluar dari konsep. Maka masalah dibatasi pada masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo Periode Tahun 2012-2013.
2. Teknik-teknik pengendalian yang digunakan dalam mengatasi kredit macet pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo Periode Tahun 2012-2013.
3. Hasil dari teknik-teknik pengendalian yang digunakan PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo untuk mengatasi kredit macet.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kredit macet pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo Periode Tahun 2012-2013?
2. Bagaimanakah teknik-teknik pengendalian yang digunakan dalam mengatasi kredit macet pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo Periode Tahun 2012-2013?

3. Bagaimanakah hasil dari teknik-teknik pengendalian yang digunakan PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo untuk mengatasi kredit macet?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo Periode Tahun 2012-2013.
2. Mengetahui teknik-teknik pengendalian yang digunakan dalam mengatasi kredit macet pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo Periode Tahun 2012-2013.
3. Mengetahui efektivitas dari teknik-teknik pengendalian yang digunakan PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo Periode Tahun 2012-2013.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian bagi Pihak PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo dalam rangka mengatasi masalah kredit macet dan diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian kredit kepada masyarakat dengan sebesar-besarnya namun tetap memperhatikan prinsip *prudential* (kehati-hatian).

2. Manfaat Penelitian bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapat dibangku perkuliahan ke dalam praktik yang sesungguhnya dalam suatu instansi atau perusahaan serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan peneliti dalam meneliti sebuah masalah

3. Manfaat Penelitian bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam mendalami masalah yang sama, sehingga kekurangan dan kelemahan yang ada pada penelitian ini dapat diperbaiki.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata Italia “*Credere*” yang berarti kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjamannya beserta bunganya sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Tegasnya, kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet. (Drs. H. Malayu S.P Hasibuan, 2009 : 87)

Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dalam jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. (Taswan, 2012 : 217)

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 seperti dikutip oleh A. Sri Susilo, dkk, (2000 : 70). Kredit dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bungayang ditetapkan.

b. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2002 : 74-76) adalah :

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan dari pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2) Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4) Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar

resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

5) Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

c. Tujuan Kredit

Tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2013 : 116) adalah sebagai berikut:

1) Mencari keuntungan.

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu, keuntungan juga

dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

2) Membantu Usaha Nasabah.

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3) Membantu Pemerintah.

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

d. Fungsi Kredit

Fungsi kredit bagi pihak bank menurut Kasmir (2008 : 100) antara lain :

1) Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2) Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3) Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang lebih bermanfaat.

4) Meningkatkan Peredaran Uang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5) Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan diberikannya kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

6) Untuk Meningkatkan Kegairahan Usaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi si nasabah yang memang pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7) Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

8) Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberi kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

e. Jenis-jenis kredit

Dalam menyalurkan kredit dunia perbankan memiliki beberapa jenis kredit. Penentuan kredit, dipilah-pilah kredit sesuai dengan kebutuhan, kegunaan, jangka waktu, sektor, dan pertimbangan lainnya. Jenis-jenis kredit yang lazim terjadi di dunia perbankan dilihat dari berbagai jenis menurut Kasmir (2010 : 253-254) yaitu:

1) Dari segi kegunaan :

- a) Kredit investasi, merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan investasi, misalnya membangun pabrik, rumah, pembelian mesin-mesin, tanah dan lainnya. Kredit investasi biasanya diberikan untuk jangka panjang.
- b) Kredit modal kerja, merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja, misalnya untuk membeli bahan baku, pembayaran gaji dan biaya lainnya. Kredit modal kerja diberikan dalam waktu yang relatif pendek dan satu kali siklus operasi.

2) Dari segi tujuan :

- a) Kredit produktif, merupakan kredit yang diberikan untuk menghasilkan sesuatu (proses produksi), baik barang maupun jasa, misalnya kredit diberikan untuk industri (pabrik), pertanian, perternakan, pabrik, perhotelan, dan lainnya.
- b) Kredit konsumtif, merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai (dikonsumsi) sendiri, misalnya membeli rumah atau kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi.

f. Prinsip-prinsip Perkreditan

Pemberian kredit pada seorang calon debitur harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6C. Keenam prinsip tersebut menurut Lukman Dendawijaya(2005 : 89-92) antara lain:

1) *Character*(C-1)

Dalam melakukan analisis mengenai watak/karakter berkaitan dengan integritas dari calon debitur. Integritas ini sangat menentukan *willingness to pay* atau kemampuan membayar kembali nasabah atas kredit yang telah dinikmatinya. Penilaian terhadap itikad atau kemauan baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya memang agak sukar untuk dilaksanakan, khususnya terhadap calon nasabah yang baru dikenal oleh bank. Penilaian

mudah dilakukan jika telah terjalin hubungan antara bank dengan calon debitur atau dapat dicarikan dari informasi yang mendukung, baik dari kalangan perbankan maupun dari kalangan bisnis. Informasi dari kalangan perbankan diperoleh melalui surat menyurat / korespondensi antar bank yang dikenal dengan *bank information*, termasuk hubungan resmi ke bank Indonesia untuk memperoleh informasi tentang calon debitur, baik mengenai pribadinya maupun perusahaan (bisnis) yang dimilikinya.

2) *Capital(C-2)*

Pembiayaan suatu proyek yang akan dijalankan debitur tidak seharusnya berasal dari bank, tetapi dibiayai bersama antara bank dan debitur. Oleh karena itu, pihak (calon) debitur wajib memiliki sejumlah dana guna dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyeknya. Perbandingan antara besarnya pembiayaan dari bank dengan besarnya modal sendiri yang dapat disediakan nasabah disebut dengan *debt to equity ratio*. Penilaian terhadap permodalan sangat erat hubungannya dengan nilai modal yang dimiliki calon nasabah guna membiayai proyek yang akan dijalanannya. Besarnya kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan yang dimilikinya. Semakin besar perusahaan yang dimiliki calon nasabah, semakin mudah memperoleh data tentang modal sendiri. Perusahaan-perusahaan

kecil biasanya tidak memiliki laporan keuangan yang dapat dianalisis oleh bank. Untuk itu wirakredit (*account officer/credit officer*) harus melakukan dialog, wawancara, dan kunjungan ke perusahaan calon nasabah untuk menyusun sendiri perkiraan laporan keuangan sehingga diperoleh informasi tentang modal sendiri yang bias digunakan untuk membiayai proyek, di samping pembiayaan yang akan diberikan bank.

3) *Capacity* (C-3)

Capacity adalah penilaian terhadap calon nasabah kredit dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman atau akad kredit, yakni melunasi pokok pinjaman disertai bunga sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diperjanjikan.

Kemampuan-kemampuan calon nasabah yang harus diukur adalah sebagai berikut ;

- a) Kemampuan (calon) nasabah menyediakan dana untuk pembiayaan.
- b) Kemampuan (calon) nasabah untuk membangun proyeknya.
- c) Kemampuan nasabah untuk menghasilkan produk dari proyeknya.
- d) Kemampuan nasabah untuk menjual hasil produksinya.

- e) Kemampuan nasabah untuk memperoleh laba dari penjualan tersebut.
- f) Kemampuan nasabah untuk menyediakan *cash* yang memadai untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada bank.

Dengan demikian hal-hal yang dianalisis adalah sebagai berikut:

- a) Jadwal pembangunan proyek yang akan dibiayai bank dan nasabah.
 - b) Rencana produksi dan penjualan (produk maupun jasa)
 - c) Proyeksi laba/rugi atau *projected income statements* (misalnya selama lima tahun atau selama jangka waktu kredit)
 - d) Proyeksi arus kas (*projected cash flow*)
 - e) Kemampuan manajerial dari pimpinan perusahaan dalam mengelola bisnisnya kelak.
 - f) Kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pada pihak-pihak lainnya.
- 4) *Conditions of economy (C-4)*

Suatu proyek yang akan dibiayai bersama oleh bank dan nasabah kredit tentu memiliki berbagai ciri tertentu, misalnya jenis bisnis yang akan digeluti, jenis produk (atau jasa) yang akan diproduksi, sasaran pasar yang akan dituju, harga yang akan ditawarkan, promosi yang akan dijalankan, dan sebagainya. Faktor-faktor bisnis yang berada dilingkungan sekitar lokasi proyek akan mempunyai

pengaruh yang kuat terhadap ciri/corak bisnis atau proyek yang akan dibangun, baik proyek baru maupun proyek perluasan. Dalam rangka proyeksi pemberian kredit, kondisi perekonomian harus pula dianalisis (paling sedikit selama jangka waktu kredit). Kondisi tersebut antara lain meliputi:

- a) Kondisi dari sektor industri di mana proyek akan dibangun;
- b) Ketergantungan terhadap bahan baku yang harus diimpor;
- c) Nilai kurs valuta terhadap nilai uang domestik (rupiah);
- d) Peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku;
- e) Kondisi perekonomian secara nasional, regional dan global;
- f) Kemudahan untuk memperoleh sumber daya (bahan baku, tenaga kerja);
- g) Tingkat bunga kredit yang berlaku; dan sebagainya.

5) *Collateral* (C-5)

Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah/Bank Indonesia, setiap pemberian kredit oleh bank harus didukung oleh adanya jaminan/agunan yang memadai, kecuali untuk program-program pemerintah. *Collateral* atau agunan kredit yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum permohonan kredit disetujui atau dicairkan. *Collateral* atau agunan pada umumnya adalah barang barang yang disediakan peminjam kepada bank sebagai jaminan atas kredit atau jaminan

yang diterimanya. Dengan demikian *collateral* atau jaminan tersebut berfungsi sebagai :

- a) Bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank;
- b) Cara yang dilakukan bank untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan usaha atau proyek yang dibiayainya;
- c) Cara untuk mendorong nasabah agar mau bersungguh-sungguh untuk melaksanakan atau mengelola proyeknya yang ikut dibiayai bank;
- d) Pengganti pembayaran apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, misalnya dijual melalui lelang umum dengan berbagai cara lain sesuai dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku.

6) *Constraints*(C-6)

Constraint merupakan faktor hambatan atau rintangan berupa faktor-faktor sosial atau psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

g. Pertimbangan Kredit

Dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan aspek-aspek pertimbangan untuk menilai kelayakan suatu usaha yang akan dibiayai

oleh kredit bank. Secara umum aspek-aspek pertimbangan kredit menurut Jumingan (2009 ; 225) meliputi:

1) Aspek Umum :

Didalam hal ini diteliti masalah-masalah:

- a) Bentuk, nama dan alamat perusahaan;
- b) Susunan manajemen;
- c) Bidang usaha;
- d) Keterangan tentang jumlah pegawai/buruh;
- e) Kebangsaan;
- f) Bank langganan;
- g) Bagan organisasi

2) Aspek Ekonomi/Komersial :

Yang meliputi masalah:

- a) Pemasaran dan keadaan harga
- b) Persaingan
- c) Jumlah penjualan dari tiap-tiap jenis produk
- d) Cara penjualan
- e) Taksiran permintaan dan sebagainya

3) Aspek Teknis :

Yang harus diteliti adalah:

- a) Bahan baku dan penolong yang dibutuhkan
- b) Tanah dan tempat parkir

- c) Bangunan (milik, sewa, umur, harga)
- d) Urut-urutan proses produksi
- e) Perincian mesin dan peralatan
- f) Jumlah produksi
- g) Tersedianya tenaga kerja (keahlian, pendidikan, tingkat upah)
- h) Dan lain-lain, misalnya mengenai tenaga penggerak (diesel atau PLN), tersedia air (sumur atau PAM) dan sebagainya

4) Aspek Yuridis :

Memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk izin-izin yang diperlukan.

5) Aspek Kemanfaatan dan Kesempatan Kerja :

Hal yang harus diperhatikan:

- a) Manfaat ekonomi bagi penduduk dan pengaruhnya terhadap struktur perekonomian setempat
- b) Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh proyek yang bersangkutan
- c) Termasuk sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah.

6) Aspek Keuangan :

Aspek terakhir yang harus dianalisis yang merupakan aspek yang paling penting adalah aspek keuangan. Dengan melakukan penilaian terhadap aspek keuangan, disamping akan dapat diketahui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, serta stabilitas usaha,

juga akan dapat diketahui berapa lama suatu investasi akan dapat dikembalikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keputusan atau kesimpulan yang diambil dalam pemberian kredit didasarkan atas kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian aspek keuangan. Jadi, aspek keuangan di dalam pertimbangan kredit memegang peranan penting, yaitu titik berat dalam analisis kredit.

h. Kebijakan Perkreditan

Kebijakan perkreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar. Program perkreditan harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian. Kebijakan perkreditan menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibulan (2009 : 92-93) antara lain :

- 1) *Bankable*, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:
 - a) *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
 - b) *Effectiveness*, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.
- 2) Kebijakan Investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini

disalurkan dalam bentuk investasi primer dan sekunder. Kebijakan risiko, kebijakan penyebaran kredit, serta kebijakan tingkat bunga.

a) *Investasi Primer*, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasana bank seperti pembelian kantor, mesin dan ATK. Dana investasi primer harus didana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka waktunya panjang. Investasi primer ini mutlak harus dilakukan karena merupakan motor kegiatan operasional bank.

b) *Investasi Sekunder*, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat (debitur). Investasi ini sifatnya produktif (menghasilkan). Jangka waktu penyaluran kredit harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas bank tetap terjamin.

3) Kebijakan Risiko

Kebijakan risiko maksudnya dalam penyaluran kredit harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan risiko maveratnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.

4) Kebijakan penyebaran Kredit

Kebijaksanaan penyebaran Kredit maksudnya kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.

5) Kebijakan Tingkat Bunga

Kebijaksanaan Tingkat Bunga maksudnya dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.

i. Penggolongan Kolektabilitas Kredit

Dalam kenyataan ini tidak semua kredit yang diberikan dapat berjalan secara lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian menuju kemacetan. Demi amannya suatu kredit, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengklarifikasikan kredit berdasarkan kelancarannya. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pengendalian kredit agar data berjalan dengan lancar. Informasi dari tingkat kolektibilitas kredit sangat berguna bagi bank untuk pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan.

Kolektibilitas adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat tata usaha bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No.

32/268/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, maka kredit dapat dibedakan menjadi :

a. Kredit lancar

Kredit lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai.

b. Kredit kurang lancar

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati. Kredit kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
- 2) Frekuensi mutasi rendah.
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari.
- 4) Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- 5) Dokumentasi pinjaman lemah.

c. Kredit diragukan

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati.

Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 3) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.

d. Kredit macet

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
- 3) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

2. Faktor-faktor Penyebab Kredit

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. (Mudjarat Kuncoro dan Suhardjono, 2002 : 465-469).

Kredit yang digolongkan dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria-kriteria:

a. Berdasarkan Prosek Usaha

- 1) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali
- 2) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun
- 3) Manajemen yang lemah
- 4) Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sangat sulit diatasi

b. Berdasarkan Kondisi Keuangan Debitur

- 1) Mengalami kerugian yang besar
- 2) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan
- 3) Rasio utang terhadap modal sangat tinggi
- 4) Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional

c. Berdasarkan Kemampuan Membayar

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Dokumentasi kredit atau pengikatan agunan tidak ada

Faktor-faktor penyebab kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono (2002 : 472-474) adalah sebagai berikut:

a. Sisi Nasabah

- 1) Faktor Keuangan

Faktor-faktor keuangan yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain:

- a) Utang meningkat sangat tajam;
- b) Utang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan asset;
- c) Pendapatan bersih menurun;
- d) Penurunan penjualan dan laba kotor;
- e) Perubahan kebijaksanaan dan syarat-syarat penjualan secara kredit;
- f) Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat;
- g) Piutang tak tertagih meningkat;

- h) Perputaran persediaan semakin lambat;
- i) Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur;
- j) Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu;
- k) Dan sebagainya.

2) Faktor Manajemen

Faktor-faktor manajemen yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain :

- a) Perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan;
- b) Tidak ada koderisasi dan *job description* yang jelas;
- c) Sakit atau meninggalnya orang penting dalam perusahaan (*key person*);
- d) Kegagalan dalam perencanaan;
- e) Manajemen puncak didominasi oleh orang yang kurang cakap;
- f) Pelanggaran terhadap perjanjian atau klausula kredit;
- g) Penyalahgunaan kredit;
- h) Pendapatan naik dengan kualitas menurun.

3) Faktor Operasional

Faktor-faktor operasional yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain :

- a) Hubungan nasabah dengan mitra usahanya semakin menurun;
- b) Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama;
- c) Pembinaan sumber daya manusia yang tidak baik;

- d) Tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan atau tidak efisien;
- e) Operasional perusahaan mencemari lingkungan;
- f) Dan sebagainya.

b. Sisi Ekstern

Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain:

- 1) Perubahan kebijaksanaan pemerintah disektor riil;
- 2) Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen perusahaan;
- 3) Kenaikan harga-harga faktor produksi yang tinggi (BBM, angkutan, dan sebagainya);
- 4) Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah;
- 5) Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman;
- 6) Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi dan kebijakan moneter lainnya;
- 7) Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya;
- 8) Bencana alam (*force majeure*);
- 9) Dan sebagainya.

c. Sisi Bank

Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain :

- 1) Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap/modal kerja;
- 2) Adanya perubahan waktu dalam permintaan kredit musiman;
- 3) Menerbitkan cek kosong;
- 4) Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit;
- 5) Adanya over kredit atau *underfinancing*;
- 6) Manipulasi data;
- 7) Over taksasi agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi;
- 8) Kredit topengan, tampilan atau fiktif;
- 9) Kelemahan analisis oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit;
- 10) Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring kredit;
- 11) Dan sebagainya.

3. Pengendalian Kredit Macet

a. Pengertian Pengendalian Kredit Macet

Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka diperlukan pengendalian. Menurut Harold Koontz (1996) seperti dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan(2009 :104-105) mengatakan *Controlis the measurement and correction of the performance of subordinates in*

order to make sure that enterprise objectives and plans devided to acton then are accomplished. (pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana ynag telah dibuat untuk mencapaitujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara).

Sedangkan menurut Drs. Malayu S.P, Hasibuan dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bank (2009 : 105) pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dantidak macet.

Lancar dan produktif artinya kredit itu data ditarik kembali bersama dengan bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.

b. Tujuan Pengendalian Kredit Macet

Tujuan pengendalian kredit Menurut Malayu Hasibuan (2009 : 105), antara lain untuk :

- 1) Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
- 2) Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- 3) Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
- 4) Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.

- 5) Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- 6) Mengetahui posisi presentase *collectability credit* yang disalurkan bank.
- 7) Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank.

c. Sistem Pengendalian Kredit Macet

Menurut Drs. Malayu S.P, Hasibuan (2009 : 105) sistem pengendalian kredit macet antara lain :

- 1) *Internal control of credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bersangkutan. Cakupannya meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit macet.
- 2) *Audit control of credit* adalah sistem pengendalian dan penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit. Jadi pengendalian atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan kredit bank.
- 3) *External control of credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh Bank Indonesia maupun akuntan publik.

d. Teknik-teknik Pengendalian Kredit Macet

Teknik pengendalian kredit macet dapat diartikan sebagai suatu penentuan syarat-syarat prosedur pertimbangan kearah kredit untuk

menghilangkan resiko kredit tersebut tidak akan dibayar lunas. Langkah-langkah yang diambil oleh bank untuk mengamankan kreditnya data digolongkan menjadi dua cara, yaitu teknik pengendalian *preventif* dan teknik pengendalian *represif*.

1) Teknik Pengendalian *Preventif*

Teknik pengendalian *preventif* adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet. Teknik pengendalian *preventif* data dilakukan dengan melakukan penyeleksian debitur dengan cara melihat kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur dengan menggunakan prinsip 6C, yang meliputi *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan *constraint*

2) Teknik Pengendalian *Represif*.

Teknik pengendalian represif yaitu teknik pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang mengalami kemacetan.

Strategi penyelesaian kredit data dilakukan dengan beberapa langkah antara lain :

a) Pemberian surat tagihan 1,2, dan 3

Pemberian surat tagihan dilakukan apabila jangka waktu pembayaran yang ditentukan telah habis. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak bank memberikan peringatan kepada debitur untuk

segera mengangsur pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan pengajuan kredit.

b) Melalui negosiasi bank dengan debitur

Bank data melakukan penguasaan sebagian atau seluruh hasil usaha, sewa barang agunan, apabila kredit belum berjalan dengan baik.

c) Penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi

Yang tercatat secara yuridis berhak menagih piutang, seperti pengadilan negeri, kejaksaan dan lain-lain.

d) Debitur macet dinyatakan pailit karena *insolvency* atau brangkut

Penagihannya data diajukan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), di mana kedudukan bank data sebagai kreditur *preferent*, bila mana bank telah melakukan pengikatan agunan, maka bank berhak menjual secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku, dengan konsekuensi bila hasil lelang masih ada sisa, maka sisa tersebut harus diserahkan kepada BHP dan bila hasil lelang tidak mencukupi, maka sisa utang yang tidak terbayar tetap merupakan utang debitur yang harus dibayar. Dengan demikian teknik pengendalian kredit macet pada umumnya adalah memperkecil resiko namun tidak dapat menghilangkan resiko yang mungkin timbul maupun yang sudah terjadi.

Dari kedua langkah teknik pengendalian kredit tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam langkah-langkah teknik pengendalian kredit macet harus dimulai sedini mungkin sebelum variable penyebabnya berpengaruh terhadap aktivitas bank.

B. Kerangka Berpikir

Pada penyaluran kredit bank, perlu diperhatikan beberapa aspek yang terkait dengan nasabah penerima kredit untuk menghindari terjadinya kredit macet. Oleh karena itu, pihak bank perlu melakukan pengendalian kredit, yaitu usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar, produktif, dan tidak macet berarti bahwa kredit beserta bunga yang telah diberikan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta pengendalian yang baik dan benar agar tidak terjadi kerugian pada pihak bank yang bersangkutan.

Pengendalian kredit dapat dilakukan sebelum merealisasikan kredit kepada debitur. Pihak bank biasanya melakukan penyeleksian terhadap calon debiturnya untuk mencegah terjadinya kredit macet. Analisis yang biasa digunakan untuk mempertimbangkan pengajuan kredit yaitu prinsip 6C (Lukman Dendawijaya, 2005 : 89-92) yang meliputi *character*, *capital*,

capacity, condition of economy, collateral, dan constraint. Selain itu, bank kemudian membuat langkah-langkah untuk penyelamatan dan penyelesaian kredit macet dengan menerapkan teknik pengendalian *prefentif* dan teknik pengendalian *represif*. Kedua teknik tersebut diharapkan mampu untuk mengatasi kredit macet yang dialami oleh bank.

C. Pertanyaan Penelitian

- 1 Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet dilihat dari faktor internal dan eksternal pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo periode tahun 2012-2013?
- 2 Bagaimanakah teknik-teknik pengendalian yang digunakan dalam mengatasi kredit macet pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo periode tahun 2012-2013?
- 3 Bagaimanakah hasil dari teknik-teknik pengendalian yang digunakan PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo untuk mengatasi kredit macet?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu rencana/rancangan mengenai cara melakukan penelitian. Adapun desain penelitian yang akan digunakan adalah desain penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat paparan yang akan ditujukan untuk mengetahui masalah kredit macet di PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo untuk periode 2012-2013.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo. Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan tugas akhir, penulis melakukan penelitian yaitu pada bulan Januari 2014.

C. Obyek dan Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, obyek penelitiannya adalah Laporan Kolektibilitas Kredit Periode 2012-2013. Sedangkan subyek penelitiannya adalah Manajer Keuangan dan Kepala Operasional.

D. Jenis Data yang Dikumpulkan

1. Data Umum

Data umum yaitu data yang tidak berkaitan langsung dalam pembahasan tetapi merupakan unsur dasar yang paling penting untuk memahami/ instansi yang diteliti. Data umum yang dibutuhkan meliputi:

- a. Sejarah perkembangan berdirinya PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo.
- b. Bidang usaha yang dilakukan PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo.
- c. Struktur organisasi PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo.

2. Data Khusus

Data khusus yaitu data yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan dibahas. Data tersebut berupa Laporan Kualitas Aktiva Produktif Periode Tahun 2012-2013.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tentang kredit macet pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo, maka penulis menggunakan teknik dokumentasi dan teknik wawancara.

1. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah kredit macet yang terjadi pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo berupa Laporan Kualitas Aktiva Produktif Periode Tahun 2012-2013.

2. Teknik Wawancara

Penelitian melakukan wawancara dengan kepala bagian operasional untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah kredit macet, meliputi faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet dilihat dari faktor internal dan eksternal, teknik-teknik pengendalian kredit macet serta hasil dari teknik-teknik pengendalian kredit macet.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang digunakan dengan cara memaparkan secara logis dan sistematis sebagai data yang diperoleh sehingga akan memberikan gambaran yang utuh terhadap permasalahan yang akan penulis ajukan. Tahap-tahap analisis deskriptif kualitatif meliputi pengumpulan data, analisis data dan pengambilan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Umum

a. Sejarah Berdirinya PD. BPR BKK PURWOREJO

PD. BPR BKK PURWOREJO didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 September 1969, nomor Dsa.G $\frac{226/1969}{8/2/4}$ tanggal 19 Nopember 1970, nomor Dsa.G $\frac{323/1970}{12/19/24}$ dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 tahun 1981 yang telah diubah dengan Perda No. 2 tahun 1988 tentang Badan Kredit Kecamatan, yang kemudiannya diubah lagi dengan Perda Nomor 4 tahun 1995, dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Nomor 15 tahun 1996 Seri D Nomor 13, kemudiannya diubah lagi dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 20 tahun 2002 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 122 tahun 2002 untuk melanjutkan usaha Badan Kredit Kecamatan dengan pengukuhan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia tanggal 26 Februari 1993, Nomor KEP.221/KM.17/1993, tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah dan berkedudukan di Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Kemudian dengan adanya Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 7/8 KEP.DpG/2005 tertanggal 25 Oktober 2005 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) Seluruh PD. BPR BKK di Kabupaten Purworejo Ke Dalam PD. BPR BKK Purworejo dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 561/64 A/2005 pada tanggal 15 November 2005 tentang Persetujuan Izin Penggabungan Usaha (Merger) Seluruh PD. BPR BKK di Kabupaten Purworejo Ke Dalam PD. BPR BKK Purworejo serta tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Perubahan Akta Pendirian berikut Perubahannya yang terakhir Nomor : 85 tanggal 13 September 2005 maka PD. BR BKK PURWOREJO statusnya menjadi Kantor Pusat dengan alamat Jl. W.R. Supratman No. 431 Cangkreplor Kabupaten Purworejo, kemudian berdasarkan Surat Izin Efektif Pemindahan Alamat Kantor Pusat No.8/1986/DPBPR/IDABPR/Sm maka alamat kantor pusat PD. BPR BKK PURWOREJO telah resmi berpindah ke Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 20 Kabupaten Purworejo.

b. Visi Misi dan Strategi Perusahaan PD. BPR BKK PURWOREJO

1) Visi PD. BPR BKK PURWOREJO

Tercapainya kondisi masyarakat yang sejahtera melalui ekonomi kerakyatan yang mantap dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2) Misi PD. BPR BKK PURWOREJO

Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah dan pembangunan di segala bidang serta sebagai salah satu sumber PADS (Pendapatan Asli Daerah Setempat) serta dengan berpegang teguh pada Prinsip Kehati – hatian dan menuju Bank yang sehat

3) Strategi PD. BPR BKK PURWOREJO

Memperbaiki / menyediakan modal bagi usaha masyarakat di Pedesaan dengan memberikan pelayanan yang Mudah Murah dan Mengarah (M3) dalam rangka mengembangkan kesempatan berusaha di Pedesaan.

c. Maksud dan Tujuan PD. BPR BKK PURWOREJO

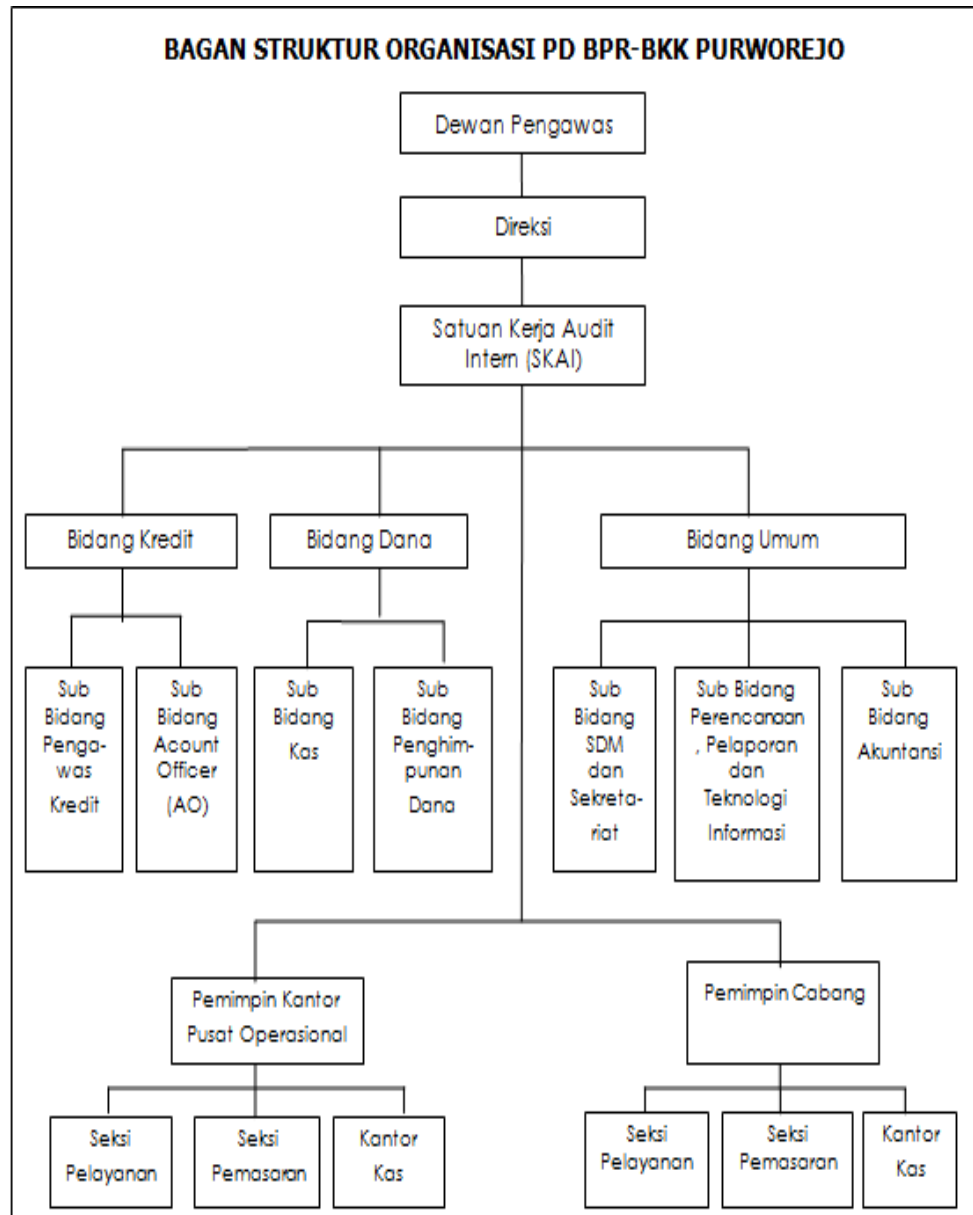
Maksud dan tujuan didirikan PD. BPR BKK PURWOREJO adalah :

- 1) Melakukan usaha Bank perkreditan rakyat dalam lingkungan masyarakat pedesaan dan perkotaan di wilayah kabupaten

Purworejo dalam rangka membantu perekonomian rakyat pada umumnya.

- 2) Memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan.
- 3) Turut serta menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha bagi masyarakat pedesaan.
- 4) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka.
- 5) Memberikan kredit untuk kegiatan-kegiatan yang produktif di bidang perdagangan, kerajinan rakyat, pertanian maupun jasa serta usaha-usaha lain yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

d. Struktur Organisasi PD. BPR BKK PURWOREJO



Gambar 1. Struktur Organisasi PD. BPR BKK PURWOREJO

e. Tugas dan Fungsi PD. BPR BKK PURWOREJO

1) Dewan Pengawas

Tugas dewan pengawas :

- a) Menetapkan kebijakan umum yang digariskan oleh Pemegang Saham
- b) Melaksanakan Pengawasan
- c) Melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan terhadap PD. BPR BKK PURWOREJO

Fungsi dewan pengawas :

- a) Penyusun tata cara pengawas dan pengelolaan PD. BPR BKK.
- b) Pengawas atas pengurusan PD. BPR BKK.
- c) Penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PD. BPR BKK.

2) Direksi

Tugas direksi :

Pembinaan serta pengendalian terhadap Bidang, Subid, KPO, Cabang Pembantu, Kantor Kas berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian.

Fungsi direksi :

- a) Pelaksanaan manajemen PD. BPR BKK berdasarkan kebijakan umum pemegang saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

- b) Penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurus dan pengelolaan PD. BPR BKK berdasarkan kebijakan umum pemegang saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
 - c) Penyusunan dan Penyampaian RKAP dan perubahannya setelah disetujui Dewan Pengawas untuk mendapat Pengesahan RUPS.
 - d) Penyusunan dan penyampaian laporan bulanan, laporan keuangan tahunan dan laporan-laporan lainnya yang diperlukan kepada Kantor Bank Indonesia dan tindakannya disampaikan kepada Badan Pembina Provinsi dan Badan Pembina Kabupaten/Kota.
 - e) Penyusunan dan pengumuman laporan Keuangan Publikasi dilaporkan Kepada Kantor Bank Indonesia serta tindakannya disampaikan kepada Badan Pembina Provinsi dan Badan Pembina Kabupaten/Kota.
 - f) Penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas.
 - g) Penyampaian Laporan akhir masa jabatan kepada Pemegang Saham Melalui Dewan Pengawas.
- 3) Satuan Kerja Audit

Tugas satuan kerja audit intern :

- a) Melakukan penilaian yang independen atas setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen PD. BPR BKK.
- b) Mendimanisasi untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar asaran organisasi dapat tercapai dengan ekonomis, efisien dan efektif.
- c) Menyusun Sistem Prosedur Pengawas dan Pengendalian Intern.
- d) Melakuakn kegiatan Audit baik secara menyeluruh atau bagian tertentu sesuai permintaan Direksi
- e) Melaporkan kepada Direksi tentang hasil pelaksanaan audit dan rekomendasi tindak lanjut atas hasil temuan.
- f) Mengevaluasi sistem dan Prosedur Operasional.

Fungsi satuan kerja audit intern ;

- a) Membantu Direksi untuk menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.
- b) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan pemantauan.

- c) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang di review kepada semua tingkatan manajemen.
- d) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di PD. BPR BKK.
- e) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.

4) Bidang Umum

Tugas bidang umum :

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melaporkan penyelenggaraan kegiatan administrasi, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, pengelolaan personalia, dan pengelolaan perlengkapan PD. BPR BKK.

Fungsi bidang umum :

- a) Perencanaan pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengevaluasian dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan, administrasi, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, pengelolaan personalia, dan pengelolaan perlengkapan PD. BPR BKK.
- b) Penata usahaan urusan surat menyurat dan pengarsipan.

- c) Penyediaan dan pengadaan peralatan.
- d) Pemeliharaan barang-barang inventaris milik Perusahaan secara efektif dan efisien.
- e) Pendataan kebutuhan pegawai, administrasi pegawai dan pendidikan pegawai.
- f) Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.

5) Sub Bidang SDM dan Sekretariat

Tugas Bidang SDM dan Sekretariat ;

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan bidang administrasi, evaluasi pengelolaan kepegawaian serta melaporkan penyelenggaraan kegiatan bidang kesekretariatan, pengelolaan personalia, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, pengelolaan personalia, dan pengelolaan perlengkapan PD. BPR BKK serta tugas lain yang diberikan oleh masyarakat.

Fungsi bidang SDM dan sekretariat :

- a) Pengkoordinasian pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas administrasi, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, pengelolaan personalia, dan pengelolaan perlengkapan PD. BPR BKK.

- b) Pelaksanaan kegiatan administrasi, urusan rumah tangga, hukum dan hubungan masyarakat, perencanaan dan pengelolaan perlengkapan serta melaksanakan kegiatan sosial.
 - c) Penata usahaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
 - d) Penyediaan dan pengadaan peralatan.
 - e) Pemeliharaan barang-barang inventaris milik Perusahaan secara efektif dan efisien.
 - f) Pendataan kebutuhan pegawai, administrasi pegawai dan pendidikan pegawai.
 - g) Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.
- 6) Sub Bidang Perencanaan, Pelaporan, dan TI

Tugas Sub Bidang Perencanaan, Pelaporan, dan TI :

Melakukan koordinasi, perencanaan, evaluasi, pemasukan data elektronik serta melaporkan kebijakan yang berhubungan dengan sistem teknologi informasi.

Fungsi Sub Bidang Perencanaan, Pelaporan, dan TI :

- a) Pengkoordinasian perencanaan pemasukan data kedalam data elektronik.
- b) Pelaksanaan pemasukan dan pengolahan data kedalam data elektronik.

- c) Pengevaluasian pelaksanaan dan pelaporan dibidang pengelolaan data elektronik.
- d) Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkahlangkah dan atau tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.
- e) Pemasukan laporan perbankan kedalam data elektronik.
- f) Membuat tugas-tugas yang berkaitan dengan data elektronik.

7) Sub Bidang Akuntansi

Tugas Sub Bidang Akuntansi :

Melakukan pengkoordinasian kegiatan pemasukan dan pengeluaran data serta melakukan penerimaan dan pembukuan dari cabang dan bidang lain.

Fungsi Sub Bidang Akuntansi :

- a) Pengkoordinasian dan mengarahkan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b) Penelitian kebenaran Laporan Kas harian
- c) Perhitungan rasio likuiditas bank
- d) Penyusunan laporan keuangan.

8) Bidang Kredit

Tugas bidang kredit :

Melaksanakan segala kegiatanyang berhubungan dengan pemberian kredit, penagihan, pengadministrasian kredit, dan pemantauan kualitas kredit.

Fungsi bidang kredit :

- a) Pelaksanaan perencanaan kredit.
- b) Penyelenggaraan usaha perkreditan dengan prinsip kehati-hatian
- c) Pemberian rekomendasi permohonan kredit yang diajukan calon nasabah.
- d) Pembinaan debitur.
- e) Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.

9) Sub Bidang Pengawas Kredit

Tugas sub bidang pengawasan kredit :

Melakukan koordinasi kegiatan pengawasan penyuluhan kredit, penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Fungsi sub bidang pengawasan kredit :

- a) Pengawasan penyaluran kredit
- b) Pemeliharaan portofolio kredit.
- c) Penyelesaian kredit yang telah dilakukan melalui AYDA dan hapus buku.
- d) Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.

10) Sub Bidang Penyaluran (*Account officer*)

Tugas sub bidang penyaluran :

Melakukan identifikasi dan seleksi calon nasabah.

Fungsi sub bidang penyaluran :

- a) Pemberian informasi kepada pejabat bank dalam rangka pengambilan keputusan kredit.
- b) Pemantau terhadap pembiayaan kredit.
- c) Pemberi informasi terhadap kredit yang harus di AYDA dan hapus buku.
- d) Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.

11) Bidang Dana

Tugas bidang dana :

Melakukan usaha dan koordinasi pengembangan dana dan pembinaan hubungan nasabah PD. BPR BKK serta menjaga likuiditas bank.

Fungsi bidang dana :

- a) Penyelenggaraan usaha pengembangan dana.
- b) Pelaksana pengelola administrasi keluar masuk dana.
- c) Pengelolaan rekening nasabah.
- d) Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.

12) Sub Bidang Kas

Tugas sub bidang kas :

Melakukan koordinasi kegiatan pemasukan dan pengeluaran uang.

Fungsi sub bidang kas :

- a) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan dan pelaksanaan tugas.
- b) Penelitian kebenaran administrasi dan laporan kas harian.
- c) Penghitung ketersediaan dan kebutuhan kas.
- d) Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.

13) Sub Bidang Penghimpun Dana

Tugas bidang penghimpunan dana :

Melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan pengerahan dana masyarakat.

Fungsi bidang penghimpun dana :

- a) Pengerah dana masyarakat.
- b) Pendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat.
- c) Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.

f. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PD. BPR BKK PURWOREJO

1) Direktur utama

Tugas direktur utama ;

- a) Merencanakan, mengkoordinir dan mengarahkan seluruh kegiatan Bank untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal perusahaan untuk menjamin kepatuhan pegawai dalam mentaati peraturan perusahaan,
- c) Mengadakan pembinaan nasabah dan pihak lainnya dalam upaya pengembangan usaha.
- d) Mengusulkan kepada Pengawas tentang Penyelesaian kredit bermasalah.
- e) Melaksanakan fungsi SPI sebelum ditunjuk petugas SPI yang definitif.

Wewenang direktur utama ;

- a) Menetapkan Strategi Bisnis dan Rencana Pencapaiannya.
- b) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan.
- c) Menetapkan peraturan perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan berdasar persetujuan Pengawas.
- d) Memutus pemberian kredit sesuai batas kewenangan yang dimiliki.
- e) Mengusulkan kepada pengawas mengenai masalah kepegawaian untuk mendukung kegiatan perusahaan, antara

lain penambahan pegawai, pengangkatan pegawai, status pegawai dan lain-lain yang berubungan dengan pegawai.

- f) Mewakili perusahaan untuk melakukan tindakan hukum dengan pihak luar.
- g) Menandatangani surat keluar dan biaya perusahaan, antara lain biaya Humas, representasi, promosi dan lainnya.

Tanggung jawab direktur utama :

- a) Kelancaran kegiatan perusahaan.
- b) Membina dan mengembangkan potensi pegawai.
- c) Mencapai tujuan perusahaan.

2) Direktur

Tugas direktur :

- a) Mengkoordinir kegiatan operasional perusahaan.
- b) Memberi pertimbangan manajemen untuk pengambilan keputusan, antara lain penyelamatan kredit bermasalah
- c) Menandatangani surat keluar bersama dengan Direktur Utama.
- d) Mencari peluang bisnis untuk pengembangan segmen pasar.
- e) Penyimpanan disket back up data dan disket sistem akuntansi.
- f) Membina hubungan bisnis dengan nasabah untuk mengetahui kebutuhan dan meyakinkannya bahwa Bank mampu memenuhi dengan kualitas prima.
- g) Tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.

Wewenang Direktur Utama:

- a) Menetapkan strataegi fungsional sebagai pelaksanaan strategi bisnis yang telah ditetapkan Direksi.
- b) Mewakili Direktur dalam hal Direktur berhalangan datang ke kantor
- c) Memutus pemberian kredit sesuai batas kewenangan yang dimiliki
- d) Menandatangani biaya yang tarifnya sudah ditentukan resmi, antara lain biaya listrik, telepon, penyusutan, dan lainnya.
- e) Menandatangani surat keluar

Tanggung jawab Direktur:

- a) Memastikan kegiatan operasional berjalan lancar sesuai rencana
- b) Evaluasi kegiatan pemasaran kredit dan operasional dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan dan menetapkan langkah perbaikan
- c) Pembinaan dan pengembangan pegawai

3) Satuan Pengawas Intern

Tugas Satuan Pengawas Intern:

- a) Menyusun sistem, prosedur pengawasan dan pengendalian intern

- b) Melaksanakan kegiatan audit baik secara menyeluruh atau bagian tertentu sesuai permintaan Direktur Utama
 - c) Melaporkan kepada Direktur Utama tentang hasil pelaksanaan audit dan rekomendasi tindak lanjut atas hasil temuan
 - d) Evaluasi Sistem dan Prosedur Operasional dan evaluasi perbaikannya kepada Direktur Utama
- 4) Kepala Bagian Kredit

Tugas Kepala Bagian Kredit:

- a) Menyusun Rencana Kredit Tahunan.
- b) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemasaran dan promosi.
- c) Supervisi kepada Staf Marketing dan Staf Administrasi Kredit.
- d) Menyusun Laporan Bulanan bidang pemasaran.
- e) Evaluasi pencapaian target pemasaran dan usulan langkah perbaikan.

Tanggung jawab Kepala Bagian Kredit:

- a) Pelaksanaan kegiatan pemasaran
- b) Pencapaian target pencapaian sesuai Anggaran Pendapatan dan Biaya yang telah ditetapkan Direksi.
- c) Penyusunan Laporan Kegiatan.

Wewenang Kepala Bagian Kredit:

- a) *Entry* data nasabah pinjaman sesuai putusan kredit.
- b) *Entry* data nasabah pinjaman yang bermasalah sesuai putusan penyelamatan kredit oleh Dewan Pengawas baik keringanan pinjaman maupun penghapusan pinjaman.

5) Staf Pemasaran (*Account Officer*)

Tugas Staf Pemasaran (*Account Officer*):

- a) Melakukan kegiatan pemasaran produk sesuai pasar sasaran untuk mencapai Target Pemasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- b) Membina hubungan bisnis yang baik dengan konsumen yang menjadi pasar sasarnya sehingga dapat diketahui kebutuhannya.
- c) Mencari informasi produk pesaing sebagai pembanding untuk peningkatan kualitas produk dan dalam rangka memenangkan persaingan.
- d) Melakukan kegiatan penagihan angsuran kredit nasabah yang menjadi tanggung jawabnya.
- e) Menyelesaikan kredit bermasalah sesuai nasabah yang menjadi tanggung jawabnya.

Tanggung jawab Staf Pemasaran (*Account Officer*):

- a) Pemasaran produk bank : pinjaman dari dana (Tabungan dan Deposito).
 - b) Pencapaian target penjualan yang di *break down* oleh Kabag Kredit.
 - c) Penyusunan laporan kegiatan pemasaran.
- 6) Staf Administrasi Kredit

Tugas Staf Administrasi Kredit :

- a) Membantu nasabah dalam pengisian dan kelengkapan berkas kredit.
- b) Menyiapkan kelengkapan berkas kredit untuk pelaksanaan akad kredit dan pengikatan jaminan kredit untuk pelaksanaan akad kredit dan pengikatan jaminan kredit yang telah disetujui.
- c) *Entry* data peminjaman pada Master Data Pinjaman.
- d) Menyiapkan berkas kredit bermasalah yang akan diajukan penyelesaian secara damai atau ke Pengadilan Negeri.
- e) Memberikan data kredit kepada *Account Officer* dalam rangka penagihan kepada nasabah : kualitas, kewajiban bunga, angsuran pokok, dan lainnya.
- f) Menyusun Laporan Bulanan Bank Indonesia perihal perkreditan.

Tanggung Jawab Staf Administrasi Kredit :

- a) Melaksanakan kegiatan administrasi kredit menggunakan Register Pinjaman, sejak kredit diajukan sampai kredit dilunasi.
- b) Memelihara mengerjakan Kartu Pengawasan Kredit.
- c) Dokumentasi (penyimpanan) berkas kredit, asli dokumen akad kredit, bukti kepemilikan jaminan dan bukti pengikatan jaminan.

7) Kepala Bagian Operasional

Tugas Kepala Bagian Operasional :

- a) Memastikan kegiatan operasional berjalan lancar sesuai Sistem dan Prosedur.
- b) Memeriksa dan mengesahkan saldo kredit.
- c) Menandatangani dokumen yang berhubungan dengan penambahan atau penyetoran kelebihan kas BPR ke bank lain.

Tanggung Jawab Kepala Bagian Operasional :

- a) Kualitas pelayanan masalah di bidang kegiatan operasional.
- b) Pelayanan intern, antara lain penggajian, cuti, dan lainnya.

Wewenang Kepala Bagian Operasional :

- a) Usulan dan pembebanan biaya perusahaan yang disetujui Direksi.

- b) Menandatangani laporan intern rutin berkaitan kegiatan operasional.

8) Kasir

Tugas Kasir :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan transaksi keuangan tunai.
- b) Pembukuan tunai transaksi tunai.
- c) Menjaga likuiditas atau kecukupan kebutuhan uang kas BPR.
- d) Membuat perincian uang kas sesuai dengan pengelompokannya.
- e) Menyimpan sisa uang kas harian di lemari besi.
- f) Menyimpan persediaan asli bilyet deposito di lemari besi.
- g) Melaksanakan kegiatan pembayaran sesuai batas wewenangnya.
- h) Menyusun laporan transaksi keuangan harian.

Tanggung Jawab Kasir :

- a) Kecukupan dana untuk mendukung kegiatan keuangan harian.
- b) Keamanan dana yang digunakan untuk transaksi harian.

9) Staf Administrasi Dana

Tugas Staf Administrasi Dana :

- a) Memelihara kecukupan persediaan bukti transaksi keuangan harian (bukti setoran, bukti pengeluaran kas, formulir aplikasi, dll).
- b) Membantu nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan di BPR.
- c) Memelihara berkas nasabah penabung (tabungan dan deposito).
- d) Entry data nasabah tabungan dan deposito.
- e) Pelaporan intern berkaitan kegiatan tabungan dan deposito.

10) Akuntansi

Tugas Akuntansi :

- a) Melakukan *open system* komputer akuntansi pada pagi hari.
- b) Menyusun laporan keuangan harian :
 - a. Mutasi harian tunai dan non tunai.
 - b. Laporan mutasi buku besar dan sub buku besar.
 - c. Laporan sisa kas harian.
 - d. Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi Harian.
- c) Menyusun Neraca dan Rugi Laba Bulanan dan Laporan Kesehatan Bank
- d) Melakukan pembukuan transaksi keuangan non tunai.
- e) Pelaporan ekstern Bank Indonesia.
- f) *Close program* akuntansi pada sore hari.

11) Verifikatur

Tugas Verifikatur :

- a) Pencocokan mutasi harian tunai dan non tunai dengan bukti keuangan.
- b) Penyimpanan arsip bukti keuangan berdasar tanggal dan urutan nomor transaksi.

12) Staf SDM dan Logistik / Umum

Staf SDM :

Tugas SDM :

- a) Melaksanakan kegiatan monitoring kehadiran pegawai.
- b) Melaksanakan kegiatan administrasi di bidang pembinaan dan pengembangan SDM, antara lain penggajian, usulan promosi, kenaikan pangkat dan tunjangan pegawai dan kegiatan lainnya.

Tanggung Jawab SDM :

- a) Memastikan bahwa kegiatan administrasi SDM telah berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan perusahaan.
- b) Penyimpanan arsip kepegawaian.

Staf Logistik / Umum :

Tugas Staf Logistik / Umum :

- a) Pengelolaan kas kecil

- b) Pemeliharaan aktiva tetap kantor agar dapat digunakan setiap saat untuk kegiatan dinas.
- c) Menyelesaikan urusan administrasi dengan Pihak III (perpajakan, dll).
- d) Menyediakan kebutuhan alat tulis kantor dan lainnya untuk mendukung kegiatan operasional kantor dalam jumlah yang cukup.
- e) Melaksanakan kegiatan kesekretariatan.
- f) Distribusi surat masuk dan surat keluar.

Tanggung jawab Staf Logistik / Umum :

- a) Memastikan bahwa aktiva tetap kantor selalu dalam keadaan siap pakai.
- b) Pengamanan semua kekayaan perusahaan.

g. Produk-produk PD. BPR BKK PURWOREJO

1) KREDIT

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan penjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Jenis-Jenis Kredit PD. BPR BKK PURWOREJO :

a) Kredit Umum

- a. Diperuntukkan bagi masyarakat umum, digunakan untuk modal kerja pada sektor dagang, industri, pertanian, jasa dan modal lainnya.
- b. Jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) bulan.
- c. Menggunakan agunan tambahan yang cukup.
- d. Debitur binaan / kredit program di bawah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dapat dilayani dengan tidak menyertakan agunan tambahan, tetapi dengan agunan tunjuk suatu benda, dan bagi nasabah binaan sekurang-kurangnya pernah mengambil 3 (tiga) periode dengan kualitas kredit lancar, hal ini tidak berlaku bagi debitur baru.
- e. Persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PD. BPR BKK PURWOREJO.

b) Kredit Pensiunan

- a. Diperuntukkan bagi pensiunan yang mengambil pensiun di PT. Pos Indonesia, Bank Jateng dan bank lainnya.
- b. Angsuran pinjaman bersumber dari pemotongan penerimaan pensiun per bulan.
- c. Batas maksimal kredit pensiunan tanpa agunan diatur dalam Surat Keputusan Direksi tersendiri.

- d. Jangka waktu kredit pensiunan maksimal 60 (enam puluh) bulan.
 - e. Persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Ketentuan bunga kredit potong gaji pensiunan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- c) Kredit Pegawai
- a. Diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil, BUMN, BUMD, TNI/POLRI dan karyawan swasta berpenghasilan tetap.
 - b. Angsuran pinjaman bersumber dari pemotongan gaji per bulan oleh bendahara gaji / juru bayar gaji.
 - c. Batas maksimal kredit tanpa agunan diatur dalam Keputusan Direksi tersendiri.
 - d. Jangka waktu kredit untuk pegawai maksimal 96 (sembilan puluh enam) bulan.
 - e. Persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Ketentuan bunga kredit potong gaji pegawai diatur tersendiri.
- d) Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor
- a. Diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil, BUMN, BUMD, TNI/POLRI dan karyawan Swasta berpenghasilan tetap.

- b. Plafond kredit maksimal sebesar harga kendaraan baik kendaraan baru maupun tidak baru.
 - c. Jangka waktu kredit maksimal 60 (enam puluh) bulan.
 - d. Sebagai agunan adalah kendaraan yang dibeli.
 - e. Persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Kredit Talangan Haji dan Umroh
- a. Diperuntukkan bagi Pengurus, Pegawai, Tenaga Kontrak Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purworejo, Pegawai Negeri Sipil, BUMN, BUMD, TNI/POLRI dan karyawan swasta berpenghasilan tetap dan masyarakat pada umumnya.
 - b. Untuk pembiayaan yang ada keterkaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, seperti selamatan haji, pengajian haji dan sejenisnya.
 - c. Jangka waktu kredit ditentukan 1 sampai dengan 60 bulan.
 - d. Persyaratan kredit talangan haji dan umroh sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PD. BPR BKK PURWOREJO.
 - e. Suku bunga kredit diatur dalam ketentuan tersendiri.
 - f. Plafond kredit Talangan Haji dan Umroh ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Talangan ongkos perjalanan haji dan umroh maksimal Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per jiwa.

- 2) Talangan ongkos selamatan haji dan umroh maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 3) Talangan ongkos biaya hidup bagi jamaat dan keluarganya selama menunaikan ibadah haji maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 4) Tidak melampaui BMPK.
- g. Biaya notaris, meterai dan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) TABUNGAN

a) TABUNGAN MASYARAKAT DESA (TAMADES)

Bunga Tamades dihitung dari saldo terendah, dengan suku bunga sebagai berikut :

Tabel 1. Saldo Minimum dan Suku Bunga Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES)

Saldo Minimum	Suku Bunga
<Rp. 25.000,-	0%/tahun
>Rp. 25.000,- s.d. Rp. 2.500.000,-	2,5% / tahun
>Rp. 7.500.000,- s.d. Rp. 25.000.000,-	4% / tahun
>Rp.25.000.000,-	5% / tahun

Syarat pembukaan rekening TAMADES adalah :

- a. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/PASPOR)
 - b. Mengisi blanko aplikasi pembukaan rekening TAMADES
 - c. Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
 - d. Saldo minimal Rp. 25.000,-
 - e. Biaya administrasi bulanan Rp. 1.500,-/bulan
- b) TABUNGAN PELAJAR

Tabungan Pelajar diperuntukkan bagi pelajar. Bunga tabungan pelajar dihitung dari saldo terendah, dengan suku bunga sebagai berikut .

Tabel 2. Saldo Minimum dan Suku Bunga Tabungan Pelajar

Saldo Minimum	Suku Bunga
<Rp. 25.000,-	0% / tahun
>Rp. 25.000,- s.d. Rp. 2.500.000,-	2,5% / tahun
>Rp. 7.500.000,- s.d. Rp. 25.000.000,-	4% / tahun
>Rp. 25.000.000,-	5% / tahun

Syarat pembukaan rekening Tabungan Pelajar :

- a. Fotokopi identitas diri (kartu pelajar)
- b. Mengisi blanko aplikasi pembukaan rekening Tabungan Pelajar
- c. Setoran awal minimal Rp. 25.000,-

- d. Saldo minimal Rp. 10.000,-
- e. Biaya administrasi bulanan Rp. 1.500,-/bulan

c) TABUNGANKU

Suku bunga tabunganku adalah 4% per tahun dan dihitung dari saldo rata-rata harian. Kelebihan Tabunganku bila dibandingkan dengan yang lain adalah tanpa biaya administrasi bulanan.

Syarat pembukaan rekening TabunganKu :

- a. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/PASPOR)
- b. Mengisi blanko aplikasi pembukaan rekening TabunganKu
- c. Setoran awal minimal Rp.10.000,-
- d. Biaya administrasi bulanan Rp. 0,-/bulan

d) TABUNGAN HAJI

Tabungan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah kurban dengan cara menabung terlebih dahulu dan setelah memenuhi jumlah/syarat tertentu panabung dapat mengambil tabungannya untuk melaksanakan kurban. Suku Bunga Tabungan Kurban adalah 0% dan tanpa biaya administrasi bulanan.

Syarat pembukaan rekening Tabungan Kurban :

- a. Fotokopi identitas diri (kartu pelajar)

- b. Mengisi blanko aplikasi pembukaan rekening Tabungan Qurban
- c. Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
- d. Saldo minimal Rp. 25.000,-
- e. Biaya administrasi bulanan Rp.0,-/bulan

3) DEPOSITO

Jangka waktu deposito bervariasi yaitu dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Suku bunga deposito PD BPR BKK PURWOREJO masih lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga deposito di Bank lain yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. Jenis dan Suku Bunga Deposito

No	Jenis Deposito	Suku Bunga Tahun 2013
1	Jk. Waktu 1 bulan	5% / tahun
2	Jk. Waktu 3 bulan	6% / tahun
3	Jk. Waktu 6 bulan	7% / tahun
4	Jk. Waktu 12 bulan	8% / tahun

arat pembukaan rekening deposito adalah :

- a. Fotokopi identitas diri
- b. Mengisi blanko aplikasi pembukaan rekening deposito
- c. Setoran minimal Rp. 1.000.000,-

- d. Deposito lebih dari Rp. 7.500.000,- dikenakan pajak sebesar 20% dari bunga deposito/bulan.

2. Data Khusus

Untuk mengetahui presentase kolektabilitas kredit macet PD. BPR BKK Purworejo tahun 2012-2013 diperlukan Laporan Kualita Aktiva Produktif. Ringkasan Laporan Kualitas Aktiva Produktif PD. BPR BKK Purworejo Tahun 2012-2013 sebagai berikut :

Table 4.

Ringkasan Laporan Kualitas Aktiva Produktif PD. BPR BKK Purworejo Tahun 2012-2013.

Tahun 2012

No.	Keterangan	Semester I	Semester II
1	Lancar	Rp 58,227,428.00	Rp60,698,546.00
2	Kurang Lancar	Rp 2,250,751.00	Rp 1,908,311.00
3	Diragukan	Rp 1,423,040.00	Rp 1,770,426.00
4	Macet	Rp 7,574,511.00	Rp 6,394,242.00
	Jumlah	Rp 69,475,730.00	Rp 70,771,525.00

Tahun 2013

No.	Keterangan	Semester I	Semester II
1	Lancar	Rp 68,142,884.00	Rp71,188,114.00
2	Kurang Lancar	Rp 1,789,930.00	Rp 2,085,796.00
3	Diragukan	Rp 1,332,953.00	Rp 1,342,310.00
4	Macet	Rp 6,922,168.00	Rp 7,042,815.00
	Jumlah	Rp 78,187,935.00	Rp 81,659,035.00

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet PD BPR BKK PURWOREJO

Faktor-faktor penyebab kredit macet merupakan hal-hal yang sering menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank seperti yang sudah diperjanjikan.

Faktor-faktor penyebab kredit macet yang menjadi kendala bagi PD. BPR BKK Purworejo dalam usaha perkreditan adalah sebagai berikut :

a. Faktor Eksternal Bank

1) Kegagalan usaha debitur

Banyak pinjaman debitur yang digunakan untuk modal kerja namun karena manajemen salah atau karena kondisi tertentu maka usaha yang dilakukan debitur tersebut menjadi bangkrut sehingga pinjaman tersebut tidak dapat tertagih lagi.

2) Adanya debitur PNS yang dinonaktifkan dari pekerjaannya

Dalam hal ini debitur PNS terkena kasus hukum sehingga harus dinonaktifkan atau dimutasi dari pekerjaannya dan pihak kantor terlambat/tidak memberitahukan kepada pihak bank sehingga piutang tersebut tidak dapat tertagih lagi.

3) Musibah (misalnya : kebakaran dan bencana alam)

Faktor musibah tersebut cukup sulit untuk diprediksi karena debitur tidak akan mampu mengetahui kejadian-kejadian yang akan terjadi terkait dengan adanya musibah tersebut.

b. Faktor Internal bank

- 1) Kesalahan petugas bank dalam menganalisa calon debitur.

Kesalahan petugas tersebut merupakan faktor internal yang paling dominan menyebabkan kredit macet. Hal ini dikarenakan bila petugas bank melakukan kesalahan atau kurang teliti dalam menganalisa calon debitur, maka pihak bank kurang dapat mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pokok pinjaman dan bunga angsuran.

- 2) Kurangnya kejelian petugas bank dalam melakukan survei jaminan.

Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan pegawai bagian kredit, sehingga terjadi kemungkinan petugas bank kurang jeli dalam melakukan survei jaminan kredit yang akan digunakan oleh calon debitur sehingga taksiran harga jaminan dapat lebih rendah dari harga yang seharusnya.

- 3) Kurangnya pengawasan (*monitoring*) kredit.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan (*monitoring*) kredit

yang dilakukan oleh bank terhadap para debiturnya, sehingga debitur akan semakin mudah dalam melakukan segala sesuatu yang sebenarnya merupakan kesalahan atau pelanggaran dan hal ini dapat berdampak pada banyaknya kredit yang tidak dapat tertagih.

4) Adanya hubungan keluarga antara karyawan bank dengan debitur.

Adanya hubungan keluarga antara karyawan bank dengan debitur dapat memicu terjadinya kredit macet. Hal itu dikarenakan pihak karyawan bank memberikan perlakuan khusus terhadap calon debitur dalam menganalisis sejauh mana tingkat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pokok pinjaman dan bunga angsuran.

2. Teknik-teknik Pengendalian Kredit Macet PD. BPR BKK PURWOREJO

Langkah-langkah yang diambil oleh PD. BPR BKK Purworejo untuk mengamankan kreditnya, pada pokoknya digolongkan menjadi dua cara, yaitu teknik pengendalian *preventif* dan teknik pengendalian *represif*.

a. Teknik Pengendalian *Preventif* pada PD. BPR BKK Purworejo

- 1) Penyelesaian debitur dalam kaitannya dengan teknik pengendalian *preventif*.

Dalam proses penyeleksian debitur pada PD. BPR BKK Purworejo, persyaratan permohonan kredit mencakup antara lain :

- a) Kredit Umum
 - a. Fotokopi KTP suami/istri
 - b. Pasfoto suami/istri
 - c. Fotokopi KK
 - d. Surat Nikah
 - e. Asli dan Fotokopi agunan
- b) Kredit Pegawai
 - a. Fotokopi KTP suami/istri
 - b. Pasfoto suami/istri
 - c. Fotokopi KK dan Surat Nikah
 - d. Asli dan Fotokopi SK pengangkatan
 - e. Struk gaji terakhir
 - f. Surat Kuasa Potong Gaji
 - g. Surat Pernyataan Potong gaji
- c) Kredit Pensiun
 - a. Fotokopi KTP suami/istri
 - b. Pasfoto suami/istri
 - c. Fotokopi KK dan Surat Nikah
 - d. Asli dan Fotokopi kartu Karip
 - e. Struk Pensiun terakhir

- f. Surat Kuasa Potong Pensiun
 - g. Surat Pernyataan Potong Pensiun
- d) Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Kredit diperuntukkan bagi Anda yang berpenghasilan tetap sebagai solusi Anda untuk memiliki kendaraan impian, baik baru maupun bekas. Persyaratan :

- a. Foto Copy KTP Suami Istri
 - b. Foto Copy KK
 - c. Foto Copy Surat Nikah
 - d. Pas Photo 4x6
 - e. Foto Copy/ Asli SK Pengangkatan dan SK Terakhir
 - f. Daftar rincian Penerimaan Gaji Terakhir
 - g. Surat Pernyataan Potong Gaji
 - h. Surat Kuasa Potong gaji
 - i. BPKB Kendaraan yang di Beli Sebagai jaminan
 - j. Jangka waktu Kredit Maksimal 5 Tahun
 - k. Syarat dan Ketentuan berlaku
- e) Kredit Talangan Haji

Kredit diperuntukkan bagi pengurus, pegawai, tenaga kontrak PD. BPR BKK Purworejo, PNS, BUMN, BUMD dan karyawan swasta berpenghasilan tetap dan umum. Persyaratan:

- a. Foto Copy KTP Suami Istri

- b. Foto Copy KK
 - c. Fot Copy Surat Nikah
 - d. Pas Photo 4x6
 - e. Foto Copy/ Asli SK Pengangkatan dan SK Terakhir
 - f. Daftar rincian Penerimaan Gaji Terakhir
 - g. Surat Pernyataan Potong Gaji
 - h. Surat Kuasa Potong gaji
 - i. Bukti setoran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH)
 - j. Syarat dan Ketentuan berlaku
- 2) Penilaian kredit yang akan diberikan berdasarkan sistem yang digunakan dalam teknik pengendalian *preventif*.

Teknik pengendalian *preventif* dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 6C yaitu :

a) *Character*

Dalam penilaian *Character* ini dilihat dari watak seseorang. Mengenai riwayat hidup calon debitur, apakah ditemukan data-data pada masa lalu calon debitur telah memenuhi kewajiban dengan jujur, tepat waktu/disiplin. Selain itu juga menilai kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan kredit yang diisi dan dikumpulkan pada pihak bank.

b) *Capital*

Dalam penilaian ini dilihat secara teliti tentang struktur dan sifat modal calon debitur berdasarkan dokumen pelengkap analisa permohonan kredit, berupa laporan perhitungan laba rugi serta neraca usaha calon debitur. Untuk keperluan tersebut sangatlah dibutuhkan adanya pembukuan yang baik atas kegiatan usaha calon debitur, oleh sebab itu petugas bank harus mampu membaca neraca dan membuat analisa neraca serta perhitungan laba ruginya.

c) Capacity

Dalam penilaian ini dilihat dari kemampuan debitur untuk membayar pinjaman. Penilaian ini ditinjau berdasarkan pekerjaan atau besar penghasilan dari calon debitur, baik yang berpenghasilan tetap maupun penghasilan tidak tetap.

d) Condition of Economy

Dalam penilaian ini petugas bank melakukan kunjungan secara langsung ke tempat usaha calon debitur dan menilai berdasarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur, seperti : keadaan sosial lingkungannya, kondisi ekonomi mendukung atau tidak, prasarana produksi tersedia dengan mudah atau tidak dan sejauh mana daerah pemasarannya.

e) Collateral

Dalam penilaian ini dilihat berdasarkan penilaian pada dokumen pelengkap agunan yang tercantum dalam persyaratan permohonan kredit, berupa laporan hasil penilaian jaminan barang bergerak dan laporan penilaian jaminan tanah dan bangunan yang disertai dengan foto copy STNK, BPKB dan Sertifikat Tanah. Barang yang digunakan untuk jaminan harus jelas ditinjau dari : nilai ekonomis, status kepemilikan dan keabsahan penggunaan untuk jaminan.

f) Constraint

Dalam penilaian ini dilakukan pada calon debitur mengenai keadaan masyarakat, dimana tempat usaha calon debitur selalu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, antara lain : adat istiadat, agama dan aturan-aturan.

b. Teknik Pengendalian *Represif* pada PD. BPR BKK Purworejo

Dalam pengendalian *represif* yang dilakukan pada PD BPR BKK Purworejo dalam usaha mengatasi kredit macet strategi penyelesaian kredit dilakukan dengan beberapa langkah antara lain :

1) Pemberian surat tagihan 1, 2 dan 3.

Pemberian surat tagihan ini dilakukan bagi semua debitur, baik untuk kredit umum maupun kredit pegawai yang mengalami kemacetan kredit. Pemberian surat tagihan ini dilakukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang

telah melampaui 90 hari dari tanggal jatuh tempo. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak bank memberikan peringatan kepada debitur untuk segera mengangsur pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan kesepakatan pada waktu dilakukan pengajuan kredit.

2) Melalui negosiasi antara pihak bank dengan debitur

Negosiasi ini dilakukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo. Langkah negosiasi ini dilakukan dengan cara pihak PD BPR BKK Purworejo mengadakan kunjungan langsung ke tempat debitur yang mengalami kemacetan, guna mencari kesepakatan antara pihak bank dan debitur atas kredit macet yang dilakukan debitur. Pihak bank dapat melakukan penguasaan atas hasil usaha seluruh atau sebagian sewa barang agunan. Bagi debitur yang berpenghasilan tidak tetap, maka bank dapat menguasai agunan yang disertakan dalam perjanjian kredit.

3) Penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi yang tercatat secara yuridis berhak menagih piutang.

Apabila tidak ada itikad baik dari debitur untuk membayar piutang setelah 270 hari dari tanggal jatuh tempo maka penyerahan hak penagihan piutang diajukan kepada badan-badan resmi yang

tercatat secara yuridis berhak menagih piutang, seperti pengadilan negeri dan lain-lain. Dalam hal ini perlunya ditentukan waktu yang relatif lama, maka tahapan ini harus diperhitungkan efisiensinya serta efektifitas yang ada, namun upaya secara kekeluargaan tetap dilakukan.

4) Penagihan kredit macet pada Balai Harta Peninggalan (BHP)

Penagihan atas kredit macet pada Balai Harta Penagihan (BHP) ini dilakukan pada semua debitur. Apabila debiturnya dinyatakan pailit karena *insolvency* atau bangkrut, maka penagihan kredit macetnya dapat diajukan kepada Balai Harta Penagihan (BHP), dimana kedudukan bank dapat sebagai kreditur *preferent*, dalam hal ini bank berhak menjual secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku, dengan konsekuensi bila hasil lelang tidak mencukupi untuk semua utang debitur, maka sisa utang tidak terbayar tetap merupakan utang debitur yang masih harus dibayar.

Untuk proses lelang, pemohon lelang dapat mengajukan permohonan lelang pada Balai Lelang Swasta atau Pemerintah. Jika melalui Balai Lelang Swasta, harus mendapat bantuan dari Kantor Lelang Negara, selaku pelaksana (juru lelang). Jadi Balai Lelang Swasta tersebut hanya membantu untuk mempersiapkan dokumen-dokumennya. Setelah seluruh dokumen lengkap, maka dimintakan jadwal lelang, dan selanjutnya pengumuman lelang di

umumkan di surat kabar selama 2 x dengan jangka waktu masing-masing 15 hari (terhitung dari tanggal pengumuman pertama sampai dengan hari pelaksanaan lelang). Setelah proses pengumuman tersebut dilaksanakan, maka lelang tersebut dapat dilangsungkan.

3. Hasil Pengendalian Kredit yang Dilakukan PD BPR BKK PURWOREJO Guna Mengatasi Krdit Macet dengan Menggunakan Teknik Pengendalian *Preventif* dan Teknik Pengendalian *Represif*

Hasil yang dicapai PD BPR BKK Purworejo dalam mengatasi kredit macet dengan menggunakan teknik pengendalian *preventif* dan teknik pengendalian *represif* dapat berjalan dengan efektif, hal tersebut dapat dilihat dari langkah-langkah yang telah ditempuh PD BPR BKK Purworejo dalam melakukan pengendalian kredit guna mengatasi kredit macet baik dengan teknik pengendalian *preventif* dan teknik pengendalian *represif*. Selain itu juga juga dapat terbukti dengan penurunan presentase jumlah kolektibilitas kredit macet yang terjadi pada PD BPR BKK Purworejo, seperti yang terlihat pada tabel presentase kolektibilitas kredit macet terhadap jumlah kredit macet yang diberikan seperti di bawah ini :

Tabel 5. Presentase kolektabilitas kredit macet terhadap jumlah kredit yang diberikan PD BPR BKK Purworejo periode tahun 2012-2013.

Tahun	Kredit Macet	Jumlah Kredit	Kolektabilitas Kredit Macet
2012 Semester I	7.574.511	69.247.833	10,90%
2012 Semester II	6.394.242	70.771.525	9,03%
2013 Semester I	6.922.168	78.187.935	8,85%
2013 Semester II	7.042.815	81.625..035	8,62%

Kolektabilitas kredit macet dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kolektabilitas kredit macet} = \frac{\text{kredit macet}}{\text{Jumlah kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Dari tabel 5 dapat diketahui jumlah presentase kolektabilitas kredit macet pada PD BPR BKK Prworejo semakin menurun, yaitu pada tahun 2012 Semester I sebesar 10,90% sedangkan Semester II sebesar 9,03%, tahun 2013 Semester I sebesar 8,85% sedangkan Semester II sebesar 8,62% artinya teknik pengendalian kredit macet yang dilakukan dalam usaha mengatasi kredit macet yang dilakukan PD BPR BKK Purworejo baik teknik pengendalian *preventif* dan teknik pengendalian *represif* berjalan secara efektif dapat menurunkan jumlah kemacetan tiap semesternya.

Walaupun jumlah presentase kolektabilitas kredit macet terjadi tiap tahun semakin menurun, akan tetapi masih terjadi kredit macet, hal ini secara dominan disebabkan adanya factor kesengajaan yang dilakukan oleh debitur itu sendiri, yaitu dengan sengaja menunda-nunda pembayaran walaupun sudah memiliki uang. Selain itu juga terjadi karena adanya faktor kesalahan petugas bank dalam melakukan analisa terhadap calon debitur yang melakukan permohonan kredit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet, antara lain :
 - a. Eksternal, seperti kegagalan usaha, adanya debitur PNS yang dinonaktifkan dan musibah (misalnya : kebakaran dan bencana alam)
 - b. Internal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari pihak bank itu sendiri, misalnya kesalahan petugas bank dalam menganalisis calon debitur, kurang jeli nya petugas bank dalam melakukan survei jaminan kredit, kurangnya pengawasan/*monitoring* kredit dan adanya hubungan keluarga antar karyawan bank dengan calon debitur.
2. Dalam mengatasi masalah kredit macet pihak PD BPR BKK Purworejo menggunakan teknik pengendalian, antara lain sebagai berikut :
 - a. Teknik pengendalian *prefentif* adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit, seperti penyeleksi debitur dan penilaian kredit yang akan diberikandengan

menggunakan prinsip perkreditan 6C (*character, capital, capacity, condition of economy dan constraint*).

- b. Teknik pengendalian *represif* yaitu teknik pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami kemacetan, misalnya dengan cara melalui pemberian surat tagihan 1,2, dan 3, negoisasi antara pihak bank dengan debitur, penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi tercatat secara yuridis berhak menagih piutang dan penagihan kredit macet pada balai harta peninggalan (BHP)
3. Dalam penerapan teknik pengendalian guna mengatasi masalah kredit macet dengan teknik pengendalian preventif maupun represif yang dilakukan PD BPR BKK Purworejo dapat berjalan dengan efektif dalam menurunkan jumlah kredit yang terjadi yaitu pada tahun 2012 Semester I 10,90% sedangkan Semester II sebesar 9,03%, Tahun 2013 Semester I sebesar 8,85% sedangkan Semester II sebesar 8,62%.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin dapat digunakan oleh Pihak PD BPR BKK Purworejo dalam mengatasi masalah yang dihadapi :

1. Dalam memutuskan suatu persetujuan pemberian kredit hendaknya diadakan seleksi terhadap calon debiturnya dengan benar dan teliti, apakah

telah sesuai dengan prinsip perkreditan 6C (*character, capital, capacity, condition of economy dan constraint*) calon debitur guna pengamanan kredit yang diberikan, sehingga dapat memperkecil faktor-faktor penyebab kredit macet pada PD BPR BKK Purworejo.

2. Untuk mengatasi masalah kredit macet pada pihak PD BPR BKK Purworejo perlu melakukan teknik-teknik pengendalian kredit yang selama ini digunakan secara berkesinambungan, dan bila perlu teknik-teknik pengendalian tersebut diperbaiki misalnya dengan menambah persyaratan pengajuan kredit berupa rekening listrik atau PDAM bulan terakhir untuk pertimbangan lebih lanjut usaha perkreditan di masa yang akan datang.
3. Dalam penerapan teknik pengendalian kredit macet dengan teknik-teknik *preventif* maupun *represif* yang dilakukan, hendaknya PD BPR BKK Purworejo mengadakan pengawasan dengan lebih ketat lagi sehingga dapat berjalan dengan efektif dalam menurunkan jumlah kredit macet yang terjadi.
4. Melakukan perekrutan tenaga kerja baru di bidang kredit sehingga pelaksanaan survei jaminan dan pengawasan terhadap kredit dapat dilakukan dengan benar dan seksama.

DAFTAR PUSTAKA

- Dendawijaya, Lukman. (2005). *Manajemen Perbankan*. Edisi Kedua. Bogor : Ghalia Indonesia
- Hasibuan, Malayu S.P. (2006). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Jumingan. (2009). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Kasmir. (2013). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen keuangan*. Edisi Pertama. Jakarta : kencana
- Kasmir. (2002). *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM
- SuratKeputusanDireksi Bank Indonesia (BI) : No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998
- Susilo, Y. Sri, dkk. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat
- Taswan. (2012). *Akuntansi Perbankan*. Edisi III. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

LAMPIRAN